BUPATI MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR 213 /Kep.Bup/Org/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN DOKUMEN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi, menetapkan "Penunjukan pejabat dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana pada ayat (1) huruf d. ditetapkan dengan Keputusan Bupati."

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Muaro Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 17);

11. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pejabat Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, pada lajur (2) selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam Jabatannya sebagaimana pada lajur (3) diberi tugas tambahan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021 di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

KETIGA : Tugas Tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berupa program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana pada lajur (4) mulai dari proses perencanaan sampai dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aggaran 2021.

KEEMPAT : Pejabat sebagaiamana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab pada Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi selaku pengguna Anggaran.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal Februari 2020

BUPATI MUARO JAMBI,

Hj. MASNAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR : /Kep.Bup/Org/2020
TANGGAL : 2020

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN DOKUMEN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama/NIP	Jabatan Saat Ini	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilimpahkan dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021	Keterangan
1	2	3	4	5
1	AKHMAD SANUSI. M, S.Pd., M.Pd	KEPALA BAGIAN PEMERINSTAHAN	**Administrasi Tata Pemerintahan** Penataan Administrasi Pemerintahan	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Administrasi Tata Pemerintahan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
2	HAZBULLAH, SE	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan** Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	
			Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	

3	AHMAD RIDWAN, SH., MH	KEPALA BAGIAN HUKUM	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	
			Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
			Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Fasilitasi Bantuan Hukum	
			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
			Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
4	MUHAMMAD IQBAL, S.STP., ME	KEPALA BAGIAN PERTANAHAN DAN BATAS WILAYAH	**Fasilitasi Kerjasama Daerah** Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	
			Administrasi Tata Pemerintahan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	
			Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota	
			Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/kota Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	

			Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	
			Penerbitan Izin Membuka Tanah Pemanfataan Tanah Kosong Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	
			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	
5	ADITIA WARMAN, S.STP	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	**Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	
			Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
			Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	
6	Drs. H. AHMAD RIADI PANE	KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN DAN KERJA SAMA	**Administrasi Pembangunan** Fasilitasi penyusunan program pembangunan	
			Koordinasi perencanaan pembangunan daerah koordinasi pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah	
			Administrasi Pembangunan pengendalian dan evaluasi program pembangunan	

			Administrasi Pembangunan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	
			pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah penyusunan pelaporan capaian pembangunan daerah	
7	ANJAR PRABOWO, ST	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	**Pengadaan Barang dan Jasa** Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
			Pengadaan Barang dan Jasa Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
8	FAUZAN ABDILLAH, S.STP	KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN	**Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam** Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	
			Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	
			Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	
9	ALIAS, SH., MH	KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA	**Administrasi Umum** Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemulangan Pegawai yang Pensiun Pemindahan Tugas PNS Pendidikan dan Pelatihan Formal Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	
			Administrasi Kepegawaian Pembuatan Daftar Penjagaan Kenaikan Pangkat Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
			Peningkatan Kapastitas ASN Peningkatan Kapasitas ASN	

			Pengembangan Karir ASN Pengembangan Karir dan Promosi ASN	
			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	
			Administrasi Umum Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pengadaan Mobil Jabatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	
			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Korpri Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	
			Administrasi Umum Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	

10	ARDIANSYAH A. ZUKRI, SE., ME	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah **Penataan Organisasi** Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan **Penataan Organisasi** Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana **Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Kabupaten/Kota** Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat **Adminsitrasi Keuangan** Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD **Penataan Organisasi** Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
11	AMIR, S. Sos	KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	**Protokol dan Komunikasi Pimpinan** Fasilitasi keprotokolan Pendokumentasian Tugas Pimpinan **Pelaksanaan Administrasi Umum** Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian **Protokol dan Komunikasi Pimpinan** Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **Pelaksanaan Administrasi Umum** Pengelolaan Rumah Tangga **Administrasi Umum** Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	
12	M. FAISAL HARAHAP, SE	KEPALA BAGIAN UMUM	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	

			Perencanaan dan Keuangan Pengelolaan Perencanaan	
			Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	
			Administrasi Umum Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	
			Perencanaan dan Keuangan Pengelolaan Keuangan Penatausahaan Pelaporan	
			Pengelolaan Barang Milik Daerah Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang Penatausahaan Barang Milik Daerah Inventarisasi Barang Milik Daerah Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	

BUPATI MUARO JAMBI,

Hj. MASNAH